



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH UNTUK PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

disampaikan dalam Rakernas APEKSI XVII tahun 2024
Balikpapan, 4 Juni 2024

LUKY ALFIRMAN

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

EXECUTIVE SUMMARY

- **Lingkungan global penuh tantangan** yang memengaruhi ekonomi domestik dan pelaksanaan APBN, oleh karena itu ekonomi domestik perlu terus dijaga agar terus tumbuh. Agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh tinggi secara berkelanjutan, diperlukan **strategi** kebijakan **desentralisasi fiskal yang mendorong pertumbuhan perekonomian daerah inklusif dan konvergen**.
- Kebijakan umum TKD 2025 diarahkan untuk mendorong **Peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan Efisien untuk akselerasi pertumbuhan**, serta mendorong **pemerataan layanan publik dan kesejahteraan di daerah**.
- APBD harus terus diperkuat sehingga ruang fiskal daerah meningkat untuk mendorong peningkatan belanja produktif melalui ***collecting more, spending better*** dan ***creative financing***.
- Pemda perlu menerapkan strategi **integral optimalisasi PDRD** dalam rangka peningkatan **kemandirian fiskal dan menjaga iklim kemudahan berusaha**.
- Strategi integral **optimalisasi PDRD** tersebut antara lain melalui **penyesuaian tarif secara terukur, perbaikan administrasi, sistem pemungutan, penguatan kelembagaan dan SDM, sinergitas pemungutan antarlevel pemerintah dan sektor terkait, serta penguatan insentif PDRD bagi investasi di daerah**.
- Prioritas belanja APBD dalam mendukung peningkatan **kesejahteraan wilayah perkotaan** dapat diarahkan pada sektor yang mengalami deprivasi indeks well-being antara lain pada **sektor lingkungan, keamanan, dan pekerjaan**.
- Daerah perkotaan dengan kapasitas perekonomian yang relatif tinggi dapat mengoptimalkan **creative financing seperti KPBU**.
- Wilayah perkotaan disebut sebagai the ***engine of global economy***, sehingga penguatan **keunggulan kompetitif perkotaan** dapat mendukung terciptanya **nilai tambah** melalui peningkatan bisnis, investasi, aktivitas ekonomi, kreativitas, talenta, dan pengunjung.



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

01

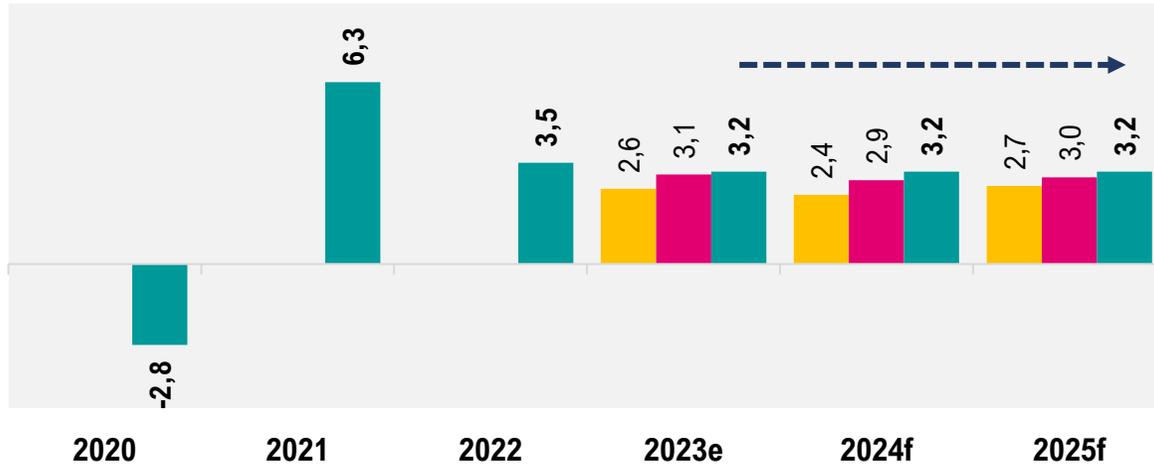
PERKEMBANGAN EKONOMI DOMESTIK & TANTANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL DIPERKIRAKAN STAGNAN



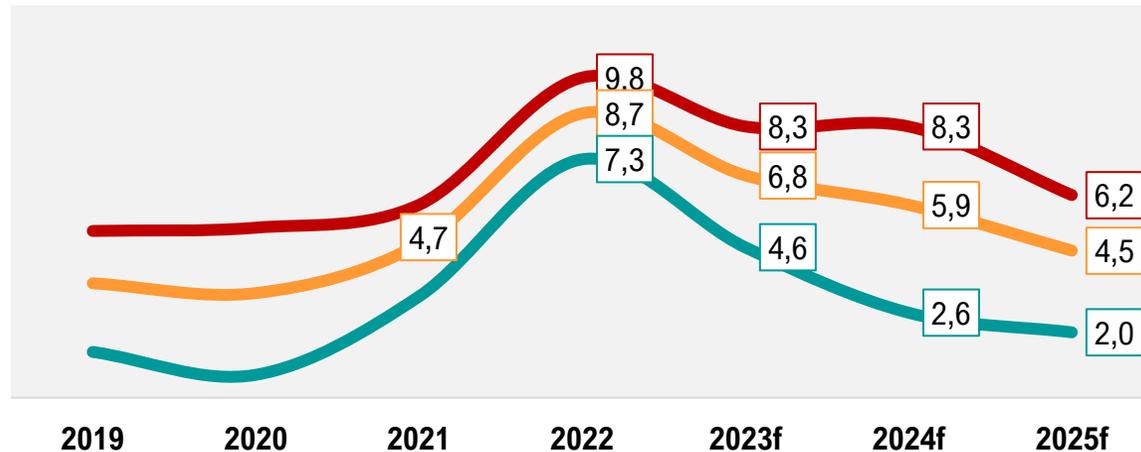
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, % yoy

■ WB Jan '24 ■ OECD Feb '24 ■ IMF Apr '24



Proyeksi Inflasi, % yoy

— Negara Berkembang — Dunia — Negara Maju



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara dan Kawasan (% yoy)

Negara/Kawasan	20 23	WEO IMF (April 2024)			
		2024f		2025f	
Dunia	3,2	3,2	↑ 0,1 (dari WEO Januari 2024)	3,2	tetap
Negara Maju	1,6	1,7	↑ 0,2	1,8	tetap
Amerika Serikat	2,5	2,7	↑ 0,6	1,9	↑ 0,2
Zona Eropa	0,4	0,8	↓ 0,1	1,5	↓ 0,2
Jepang	1,9	0,9	tetap	1,0	↑ 0,2
Negara Berkembang	4,3	4,2	↑ 0,1	4,2	tetap
Tiongkok	5,2	4,6	tetap	4,1	tetap
Indonesia	5,1	5,0	tetap	5,1	↑ 0,1
India	7,8	6,8	↑ 0,3	6,5	tetap
Brazil	2,9	2,2	↑ 0,5	2,1	↑ 0,2
ASEAN-5	4,1	4,5	↓ 0,2	4,6	↑ 0,2

TANTANGAN PEREKONOMIAN PADA LINGKUNGAN GLOBAL DAN TANTANGAN BESAR LAINNYA MEMPENGARUHI EKONOMI DOMESTIK DAN PELAKSANAAN APBN



Diperlukan Sinergi dan Kolaborasi Semua Pihak Agar Tantangan Dapat Teratasi Dengan Baik

Eskalasi Tensi Geopolitik: Fragmentasi dan Proteksionisme

- Konflik di Timur Tengah di tengah konflik Ukraina yang berlanjut
- Pertumbuhan ekonomi global melambat
- Perdagangan dan investasi global melemah
- Perekonomian Tiongkok melambat terutama karena krisis sektor properti, lemahnya *demand*, dan ageing population
- Potensi krisis utang di banyak negara
- Harga komoditas energi dan pangan meningkat

Suku Bunga Global Tinggi

- Likuiditas ketat dan arus modal terbatas
- Investasi semakin menantang
- Nilai tukar tertekan
- Bunga utang tinggi
- Pembiayaan defisit APBN semakin mahal

Tantangan Besar Lain Masih Terus Berlangsung



Digitalisasi

- Mengurangi lapangan kerja tradisional
- *Cyber security*



Perubahan Iklim

- Bencana alam (banjir, kekeringan, dll)
- Produktivitas pertanian & perikanan turun
- Pendanaan APBN meningkat



Aging Population

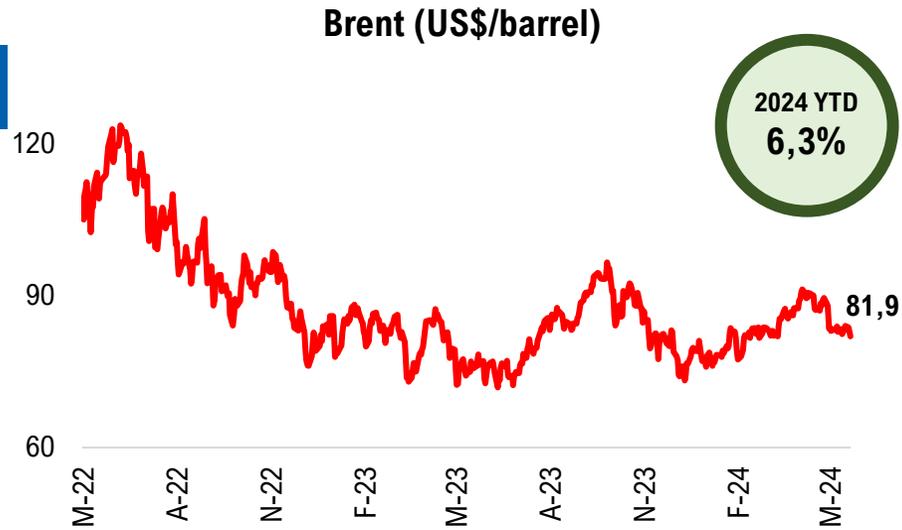
- Pertumbuhan ekonomi akan melambat dalam jangka panjang
- Beban fiskal akan meningkat

HARGA KOMODITAS ENERGI DAN PANGAN MASIH FLUKTUATIF

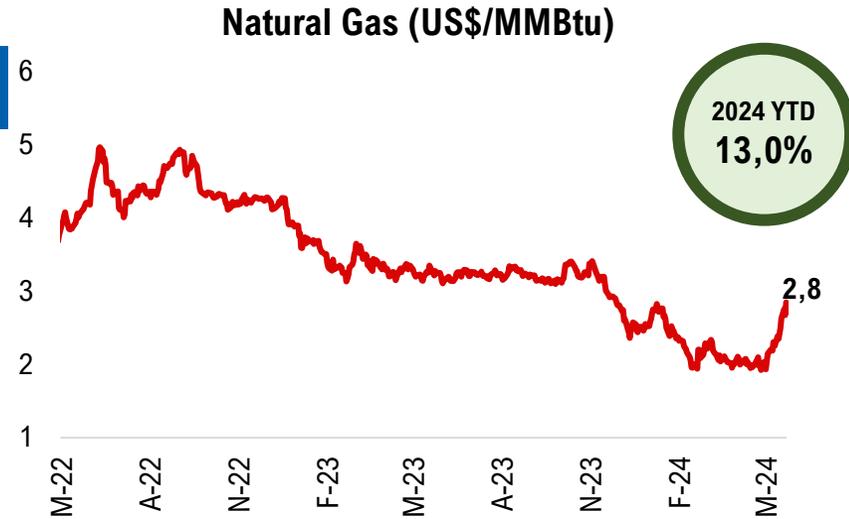


Selain permintaan dan penawaran, volatilitas harga juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan perubahan iklim.

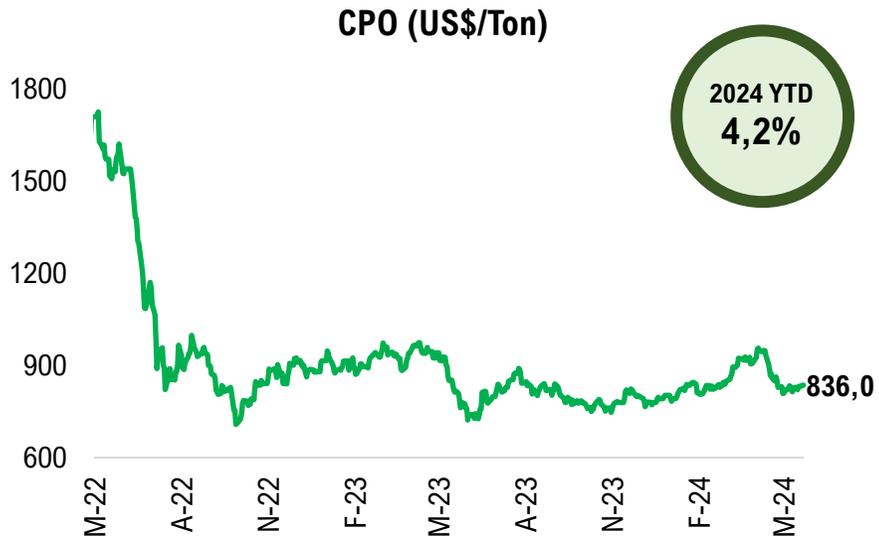
Brent



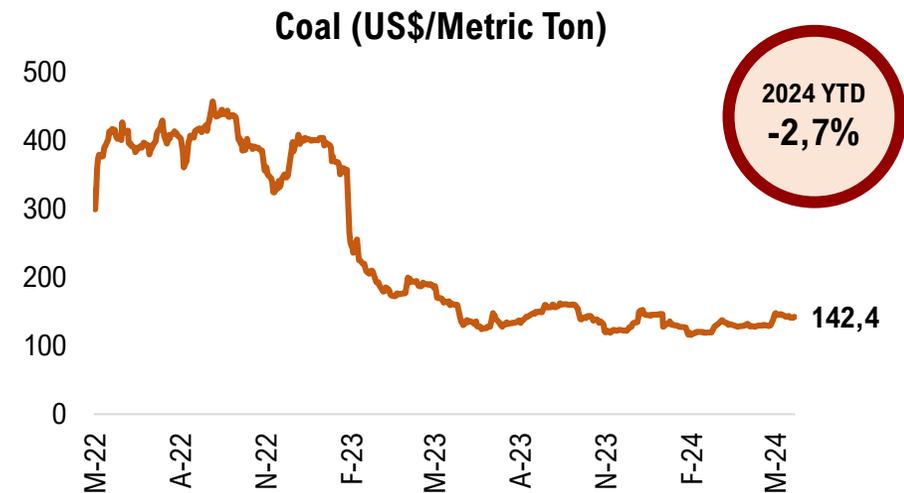
Natural Gas



CPO



Coal

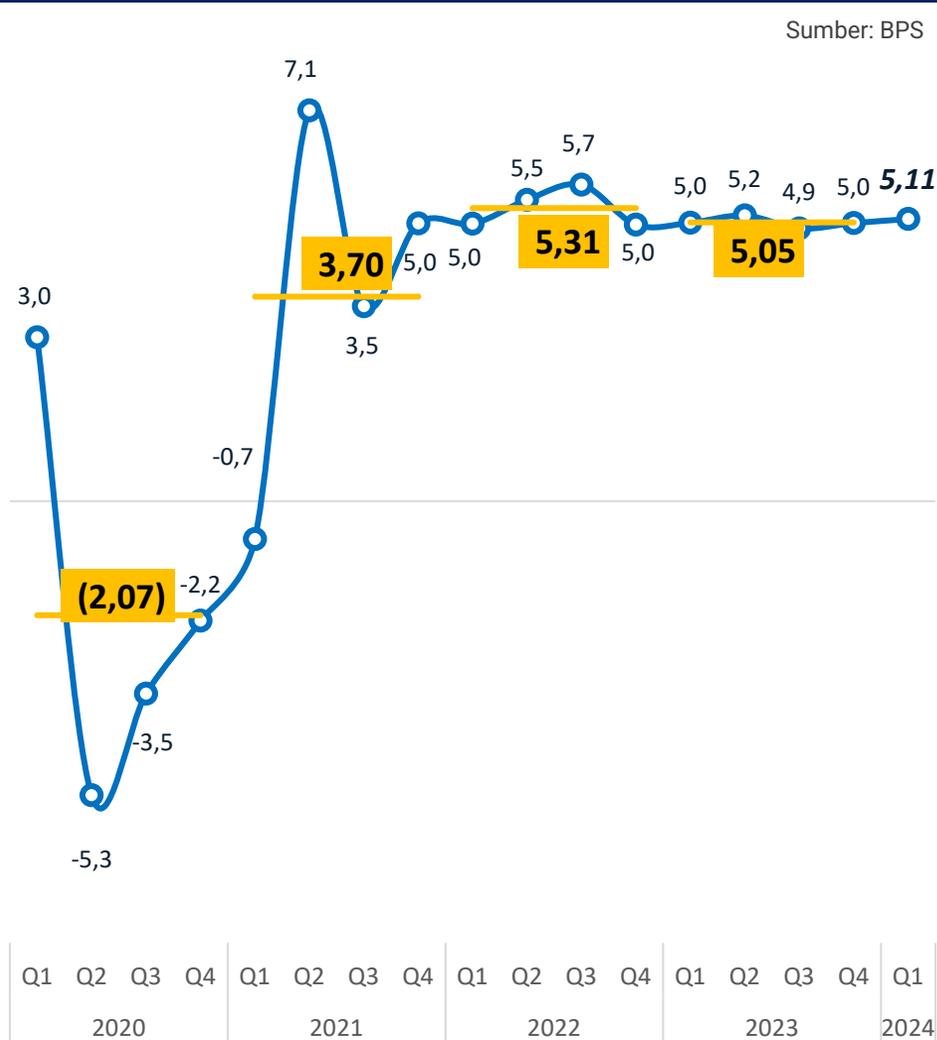


EKONOMI INDONESIA KEMBALI TUMBUH MENGUAT PADA TRIWULAN I 2024 MENCAPAI 5,11%

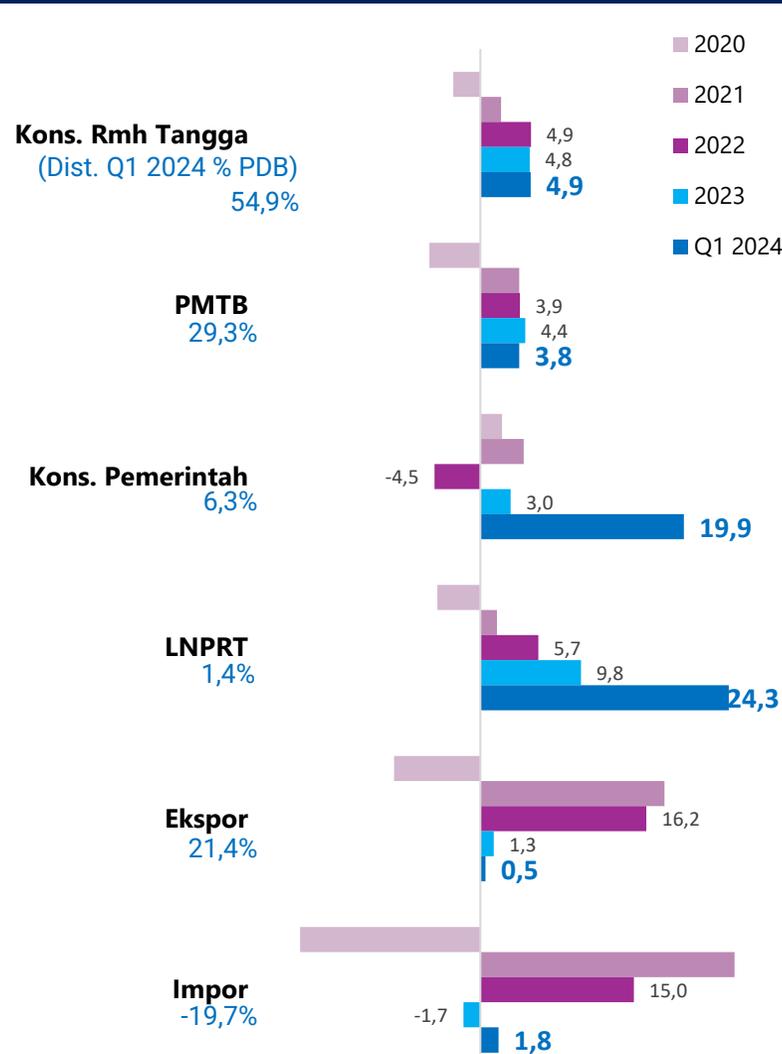


Dominan didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91% dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,13% dari sisi produksi.

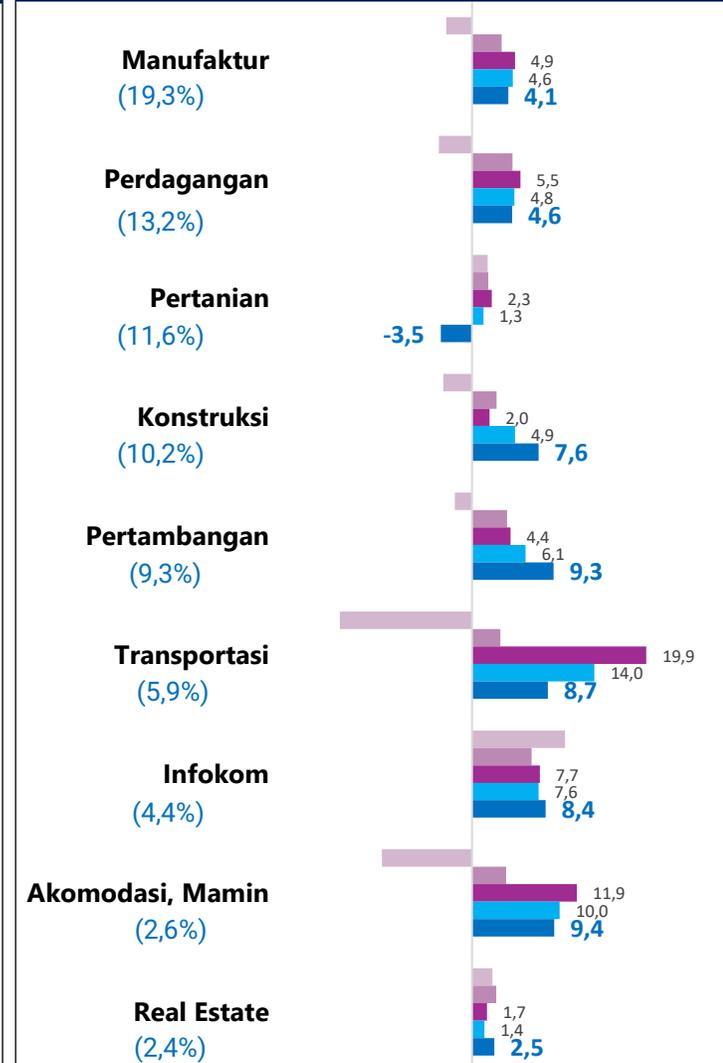
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)



Pert. Komponen Pengeluaran (%yoy)



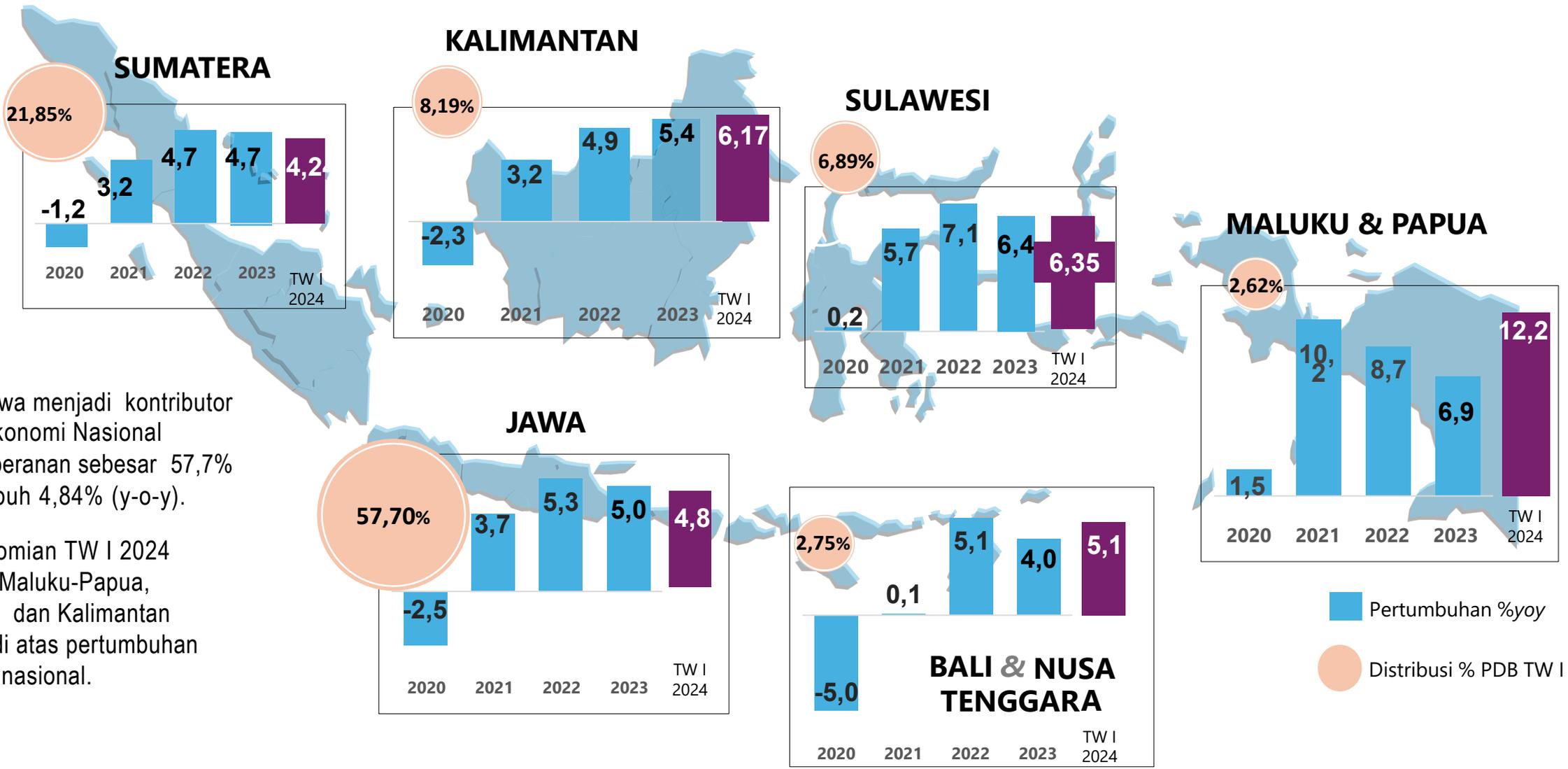
Pert. Komponen Produksi (%yoy)





STRUKTUR PEREKONOMIAN SPASIAL MENGUAT

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai wilayah berbasis hilirisasi SDA, yaitu wilayah Maluku-Papua dan Sulawesi



- Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,7% dan tumbuh 4,84% (y-o-y).
- Perekonomian TW I 2024 wilayah Maluku-Papua, Sulawesi dan Kalimantan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

■ Pertumbuhan %yoy
● Distribusi % PDB TW I 2024

INFLASI TETAP TERKENDALI, TEKANAN HARGA PANGAN MULAI MEREDA

Memengaruhi ekonomi domestik dan pelaksanaan APBN, diperlukan **sinergi semua pihak** untuk mengatasi tantangan



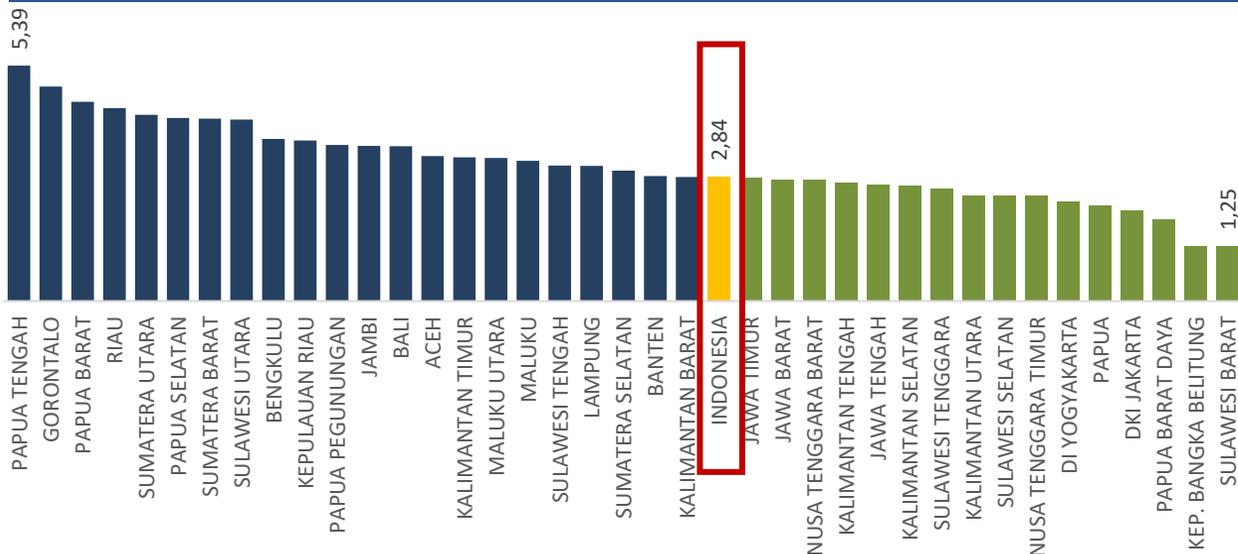
Inflasi nasional m-to-m (%)



Inflasi nasional y-o-y (%)



Inflasi Bulan Mei y-oy(%)



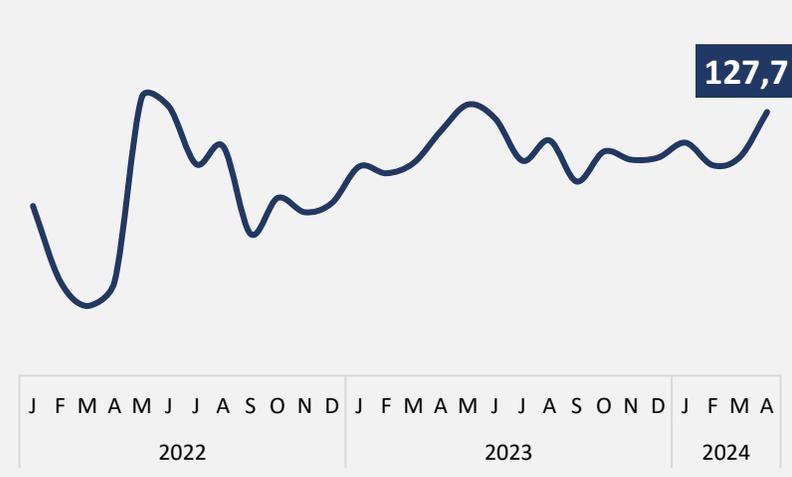
- Pada **Bulan Mei 2024**, secara nasional mengalami **deflasi -0,03% (m-to-m)** diantaranya karena penurunan harga **beras, daging ayam ras**, ikan segar, tomat, cabai rawit, pepaya, kentang, **tarif angkutan antar kota, tarif angkutan udara, dan tarif kereta api.**
- Secara **y-o-y** inflasi berada pada angka **2,84%** lebih rendah dari Bulan Mei tahun 2023 yakni sebesar 4%. **Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tetap terkendali.**
- Inflasi tertinggi (y-o-y) Bulan Mei di Prov. Papua Tengah sedangkan terendah di Prov. Sulawesi Barat.

PROSPEK PEREKONOMIAN JANGKA PENDEK TETAP TERJAGA



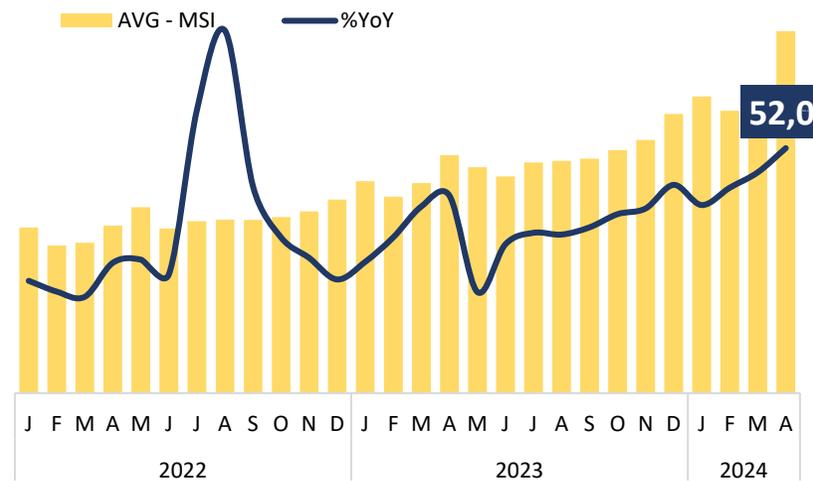
Perkembangan indikator konsumsi dan produksi memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi di triwulan II.

Peningkatan IKK menunjukkan optimisme masyarakat tetap terjaga tinggi (April, Index)



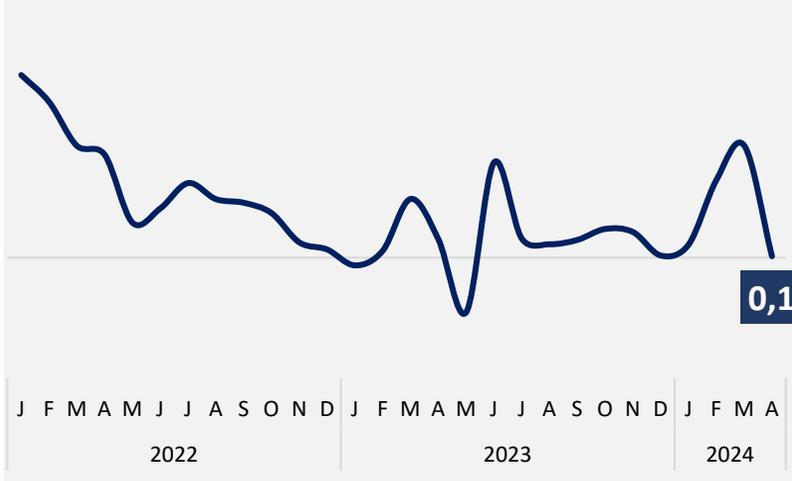
Sumber: Bank Indonesia

Mandiri Spending Index menunjukkan konsumsi tetap tumbuh tinggi (April, Index)



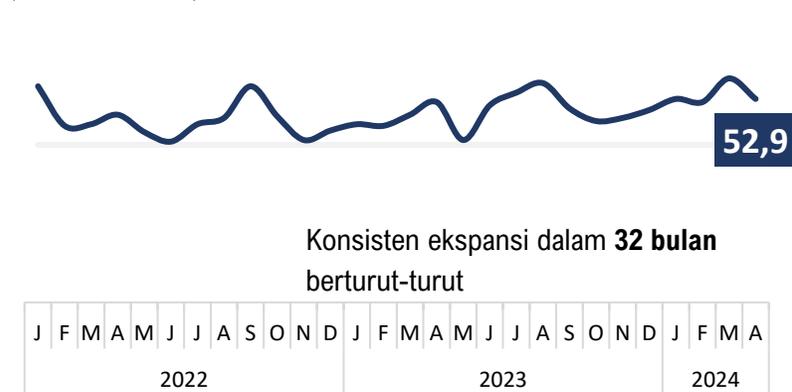
Sumber: Mandiri Institute, per 28 April 2024

Indeks Penjualan Riil tumbuh melambat (April, % yoy)



Sumber: Bank Indonesia

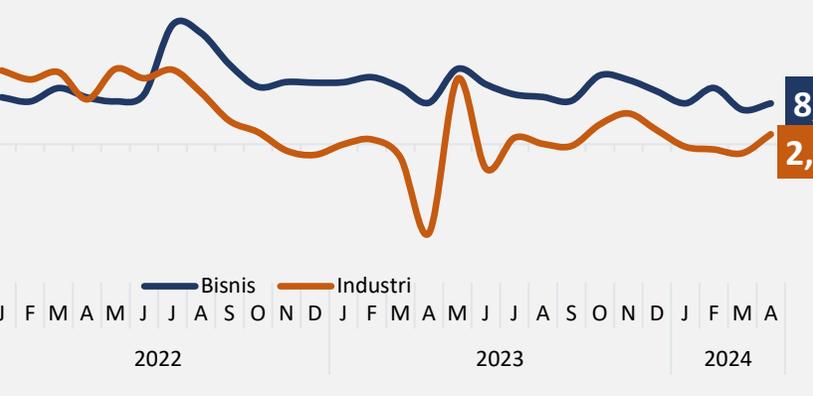
PMI Indonesia masih ekspansif (April, Index)



Konsisten ekspansi dalam 32 bulan berturut-turut

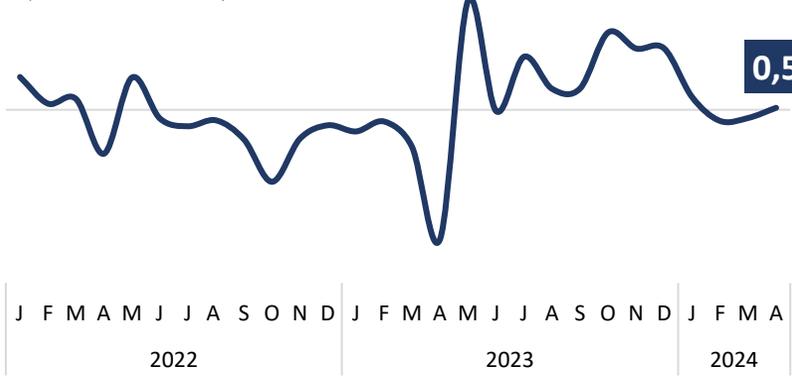
Sumber: Bloomberg, IHS Markit

Konsumsi Listrik bisnis dan industri tumbuh kembali (April, % YoY)



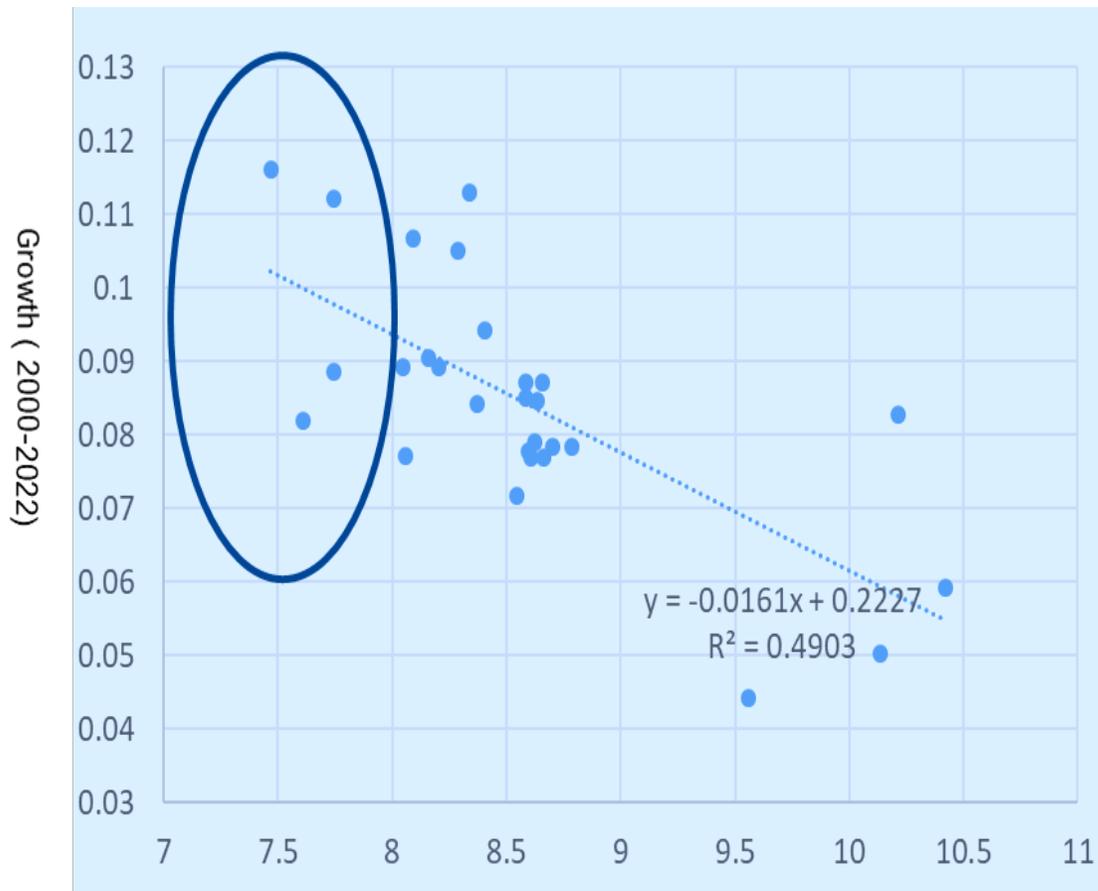
Sumber: PLN

Konsumsi semen rebound pasca Ramadan (April, % YoY)



Sumber: ASI

DESENTRALISASI FISKAL TELAH MENDORONG ADANYA KONVERGENSI ANTAR DAERAH, NAMUN DEMIKIAN KECEPATANNYA MASIH DAPAT DITINGKATKAN



Ln PDRB/kapita Tahun 2000

- Provinsi yang pendapatan perkapitanya tahun 2000 lebih kecil memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi **lebih besar** pada periode 2000 - 2022. Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan konvergensi selama implementasi desentralisasi fiskal.
- Namun demikian, kecepatan konvergensi ekonomi tersebut masih perlu ditingkatkan
- Diperlukan **strategi akselerasi** pertumbuhan ekonomi daerah yang **sesuai dengan potensinya** agar konvergensi antar daerah dapat dipercepat



PEREKONOMIAN DAERAH TERUS TUMBUH, KEMISKINAN MENURUN NAMUN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MASIH CUKUP TINGGI, DIPERLUKAN STRATEGI AGAR PERTUMBUHAN SEMAKIN INKLUSIF

PERTUMBUHAN EKONOMI	TINGKAT KEMISKINAN	PENGANGGURAN TERBUKA	GINI RASIO
---------------------	--------------------	----------------------	------------

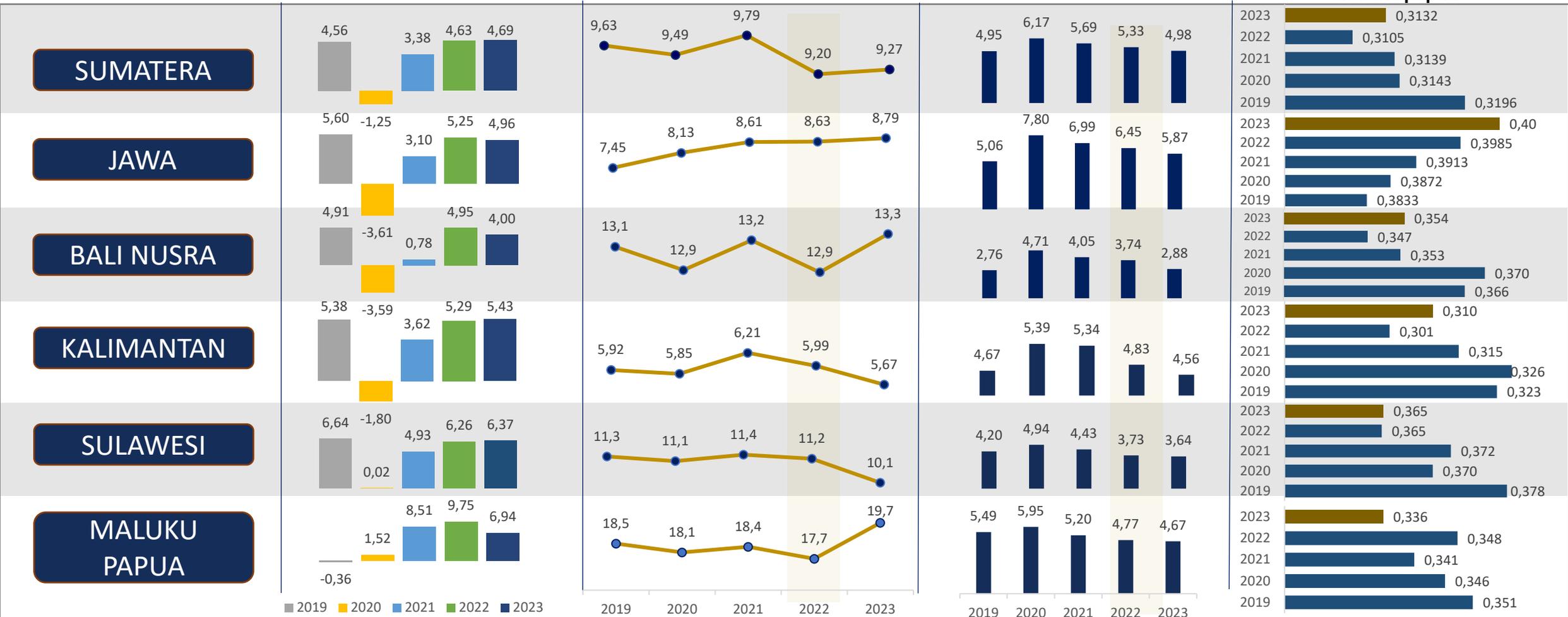


Aktivitas Ekonomi masih terkonsentrasi di Jawa namun Indonesia timur (Sulamapua) kini tumbuh lebih tinggi karena komoditas

Perlu melakukan **effort** lebih untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebagian besar region. Kalimantan memiliki kemiskinan paling rendah

Perekonomian daerah sensitif terhadap mobilitas fisik, TPT 2022 di semua wilayah mengalami perbaikan

Ketimpangan pendapatan perlu segera diatasi karena hampir semua region mengalami peningkatan kesenjangan kecuali Maluku Papua

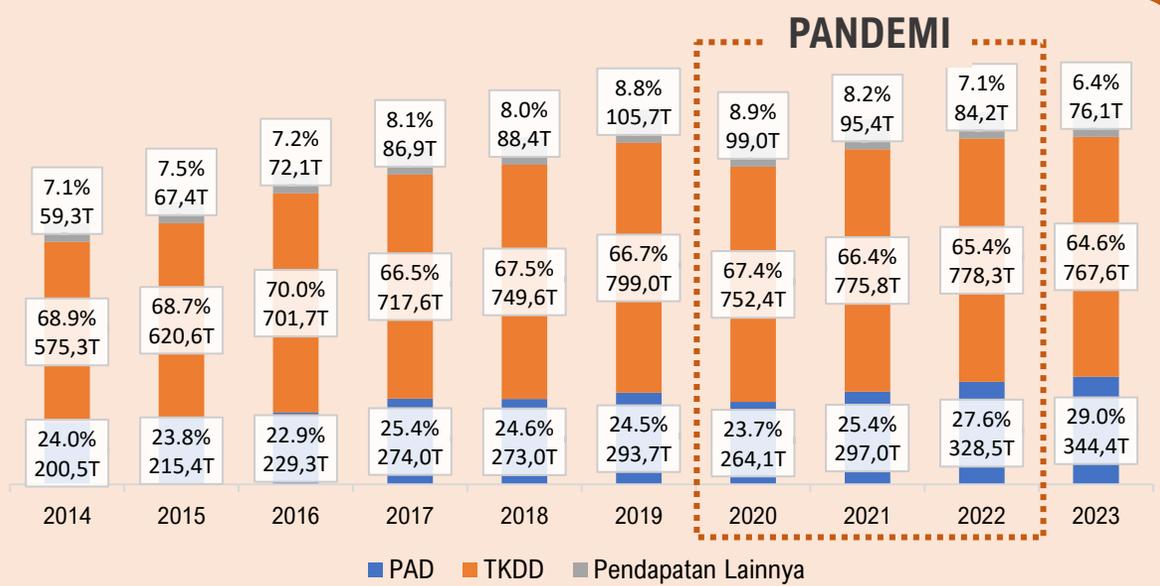




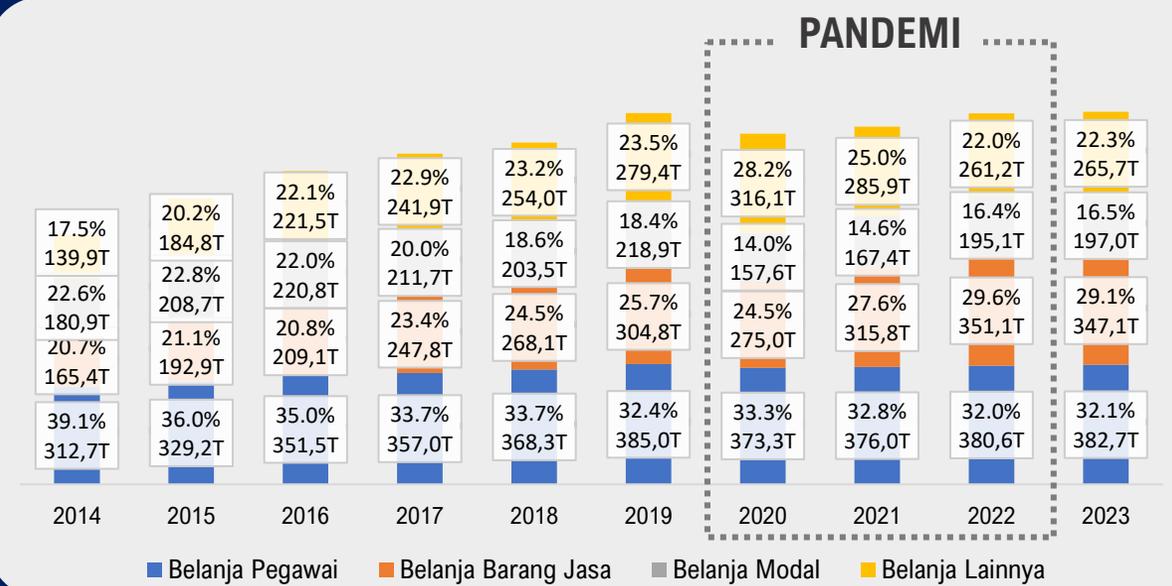
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF MEMERLUKAN DUKUNGAN KEBIJAKAN FISKAL YANG TEPAT

Kebijakan TKD telah mampu mendorong penguatan **kemandirian fiskal daerah**, namun **kualitas belanja daerah** perlu ditingkatkan agar pertumbuhan yang **inklusif** dapat diakselerasi

PENDAPATAN



BELANJA



PAD perlu terus dioptimalkan sebagai sumber Pendapatan Daerah sehingga ruang fiskal daerah meningkat



- Transfer ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan daerah (rata-rata 67,2%), namun porsinya terus menurun.
- Porsi PAD **relatif meningkat** dari 24,0% (2014) menjadi 29,0% (2023), yang berarti kemandirian fiskal terus meningkat

Belanja perlu didorong untuk refocusing ke jenis belanja produktif agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan publik



- Kapasitas belanja daerah terus meningkat dari Rp798,9T (2014) menjadi Rp1.192,5T (2023)
- Porsi terbesar berupa **belanja pegawai** (rata-rata 34,0%) dengan kecenderungan menurun dari 39,1% (2014) menjadi 32,1% (2023)
- Belanja modal **perlu terus ditingkatkan** (rata-rata 18,4%) untuk mengakselerasi pertumbuhan daerah



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

02

**ARAH KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
DAN STRATEGI PENINGKATAN
KEMANDIRIAN FISKAL DALAM
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI**

ARAHAN PRESIDEN DALAM MUSRENBANGNAS 2025



Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pembangunan harus berdasarkan:

Program harus **tepat sasaran** dan **strategis**



program harus **inline** dan **seirama**, pusat dan daerah

Program harus berorientasi hasil, menghasilkan return ekonomi dan ada skala prioritas

Diperlukan Sinergi Kebijakan Fiskal untuk mendukung sinkronisasi Program Pembangunan:



Alokasi

Penyusunan kerangka kebijakan ekonomi makro dan fiskal pembangunan dapat jelas menjembatani target sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.



Distribusi

Penyelarasan kebijakan fiskal pusat daerah pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dimana daerah dapat bersifat partisipatif berdasarkan arahan presiden dan DPR



Stabilisasi

Pengendalian manajemen risiko fiskal daerah yang jelas dan terukur. Mengendalikan anggaran secara efektif, sinergis, dan berintegritas baik dalam kondisi darurat ataupun normal.

Sistem informasi terkonsolidasi

Digitalisasi monitoring & evaluasi



Kebijakan Fiskal 2025 Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Tantangan & Peluang

Global:

- Tensi Geopolitik
- Fragmentasi (*Trade & Investment*)

Domestik:

- Pertumbuhan melambat
- Deindustrialisasi
- *Three gaps*; SDM, infrastruktur, dan birokrasi & regulasi

Climate Change:

- Bencana alam (kekeringan, banjir, dll)
- Penurunan produktivitas

Digitalisasi:

- Otomatisasi
- Transaksi digital
- Dampak ke *labor market*

Fokus Kebijakan Jangka Pendek

A

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

B

Penguatan *Well-Being*

C

Konvergensi Antardaerah

Strategi Jangka Menengah

1. SDM
2. Inklusivitas
3. Infrastruktur
4. Hilirisasi & Transformasi Hijau
5. Reformasi Birokrasi & Regulasi

Tujuan Jangka Panjang



APBN SEHAT

1

Collecting More

2

Spending Better

3

Innovative Financing

APBN DAN APBD PERLU SINERGIS

Arah kebijakan fiskal nasional perlu diterjemahkan dalam **strategi kewilayahan** agar Daerah dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan fiskal nasional



**AKSELERASI
PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG
INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN**



Fokus



**Akselerasi
Pertumbuhan**

Intervensi

Penguatan **kualitas** dan **kuantitas** belanja **produktif** dan **penguatan investasi** di daerah

Approach

Regional Growth Strategy melalui pengembangan **sentra ekonomi baru** di daerah

Strategi

- Peningkatan **kualitas** Belanja Daerah
- Penguatan **local taxing power & creative financing**
- **penguatan ekosistem** perekonomian daerah



**Percepatan
Konvergensi**

Pengembangan **Sentra Ekonomi Baru** termasuk daerah **Afirmasi**

- Penguatan **kerjasama antar daerah**, dan keterlibatan daerah dalam **global supply chain**
- Pengembangan **Desa Mandiri**



**Penguatan
Wellbeing**

Kebijakan Transfer ke Daerah yang **asimetris (berbasis kebutuhan dan karakteristik daerah)**

Regional Wellbeing Index untuk melihat level **deprivasi** suatu daerah

- Penguatan **Earmarking TKD dan PDRD**.
- Penguatan **Evaluasi Mandatory Spending**



PENGELOLAAN RISIKO FISKAL DAERAH





2023-2025



TRANSFER BERBASIS KINERJA

- 1 DAU Yang Diarahkan Penggunaannya untuk mendorong pencapaian SPM daerah
- 2 DBH sawit untuk menangani eksternalitas negatif melalui pembangunan infrastruktur jalan
- 3 Alokasi DBH mempertimbangkan kinerja daerah dalam mendorong penerimaan dan pemeliharaan lingkungan
- 4 Insentif Fiskal atas kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan
- 5 Insentif bagi Desa berkinerja
- 6 Penyaluran berbasis kinerja untuk mendorong pengelolaan keuda yang lebih baik

2023-2025



OPTIMALISASI PDRD

- 1 Menurunkan *administrative dan compliance cost* melalui restrukturisasi jenis pajak dan rasionalisasi retribusi.
- 2 Memperluas basis pungutan pajak secara terukur & penyesuaian tarif
- 3 Penguatan Sinergitas Nasional pemungutan PDRD
- 4 Pelaksanaan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB

2024-2025



HARMONISASI FISKAL

- 1 Penyelarasan prioritas nasional dan daerah melalui Bab **KEMPPKF Regional** di dalam KEMPPKF
- 2 Penyusunan Kerangka Manajemen **Risiko Fiskal Daerah** untuk mendorong pengelolaan fiskal nasional dan APBN yang lebih sehat

2025



PEMBIAYAAN DAERAH

- 1 Mendorong perluasan akses terhadap skema alternatif pembiayaan (Obligasi, Sukuk Daerah)
- 2 Penguatan pembiayaan kreatif (KPBU dan Dana Abadi Daerah)
- 3 Memperkenalkan skema **Sinergi Pendanaan** untuk akselerasi pembangunan daerah.

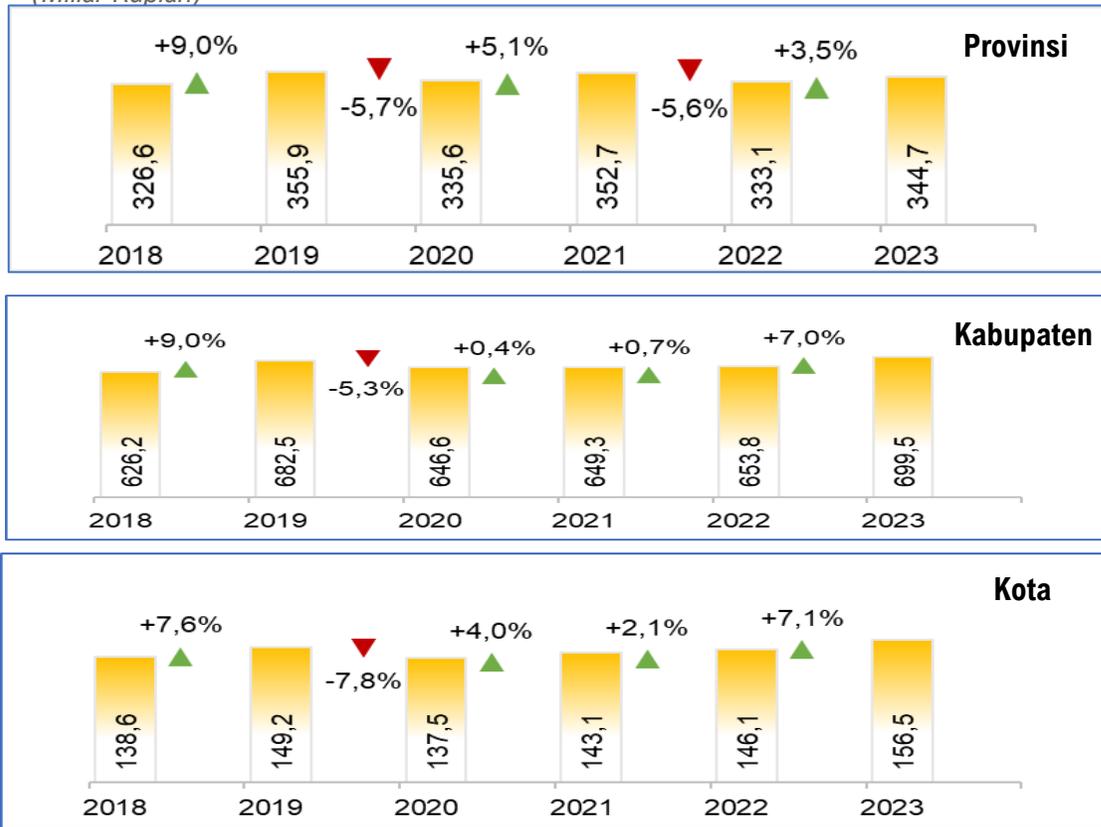
BELANJA PRODUKTIF DALAM APBD TERUS DITINGKATKAN UNTUK AKSELERASI PERTUMBUHAN



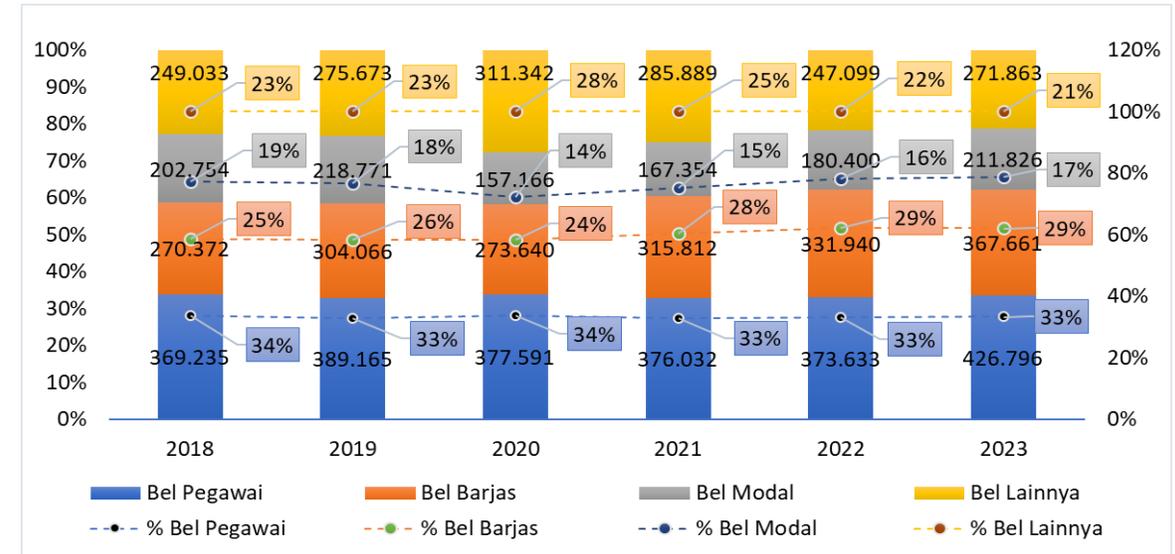
Penyerapan Belanja Daerah perlu ditingkatkan. Daerah perlu didorong untuk mengendalikan belanja pegawai dan mendorong belanja modal.

(Miliar Rupiah)

Kinerja Belanja APBD



Komposisi Belanja Daerah



⚙️ **Belanja pegawai** merupakan belanja dengan proporsi terbesar dengan rata-rata 2018 – 2023 sebesar 33%.

*UU HKPD mengamanatkan Belanja Pegawai **maksimal 30%***

⚙️ **Belanja modal** merupakan belanja yang perlu mendapatkan perhatian karena mengalami penurunan jika pada tahun 2019 proporsi belanja modal sebesar 19% sedangkan pada tahun 2023 proporsi belanja modal turun menjadi sebesar 17%.

Sumber: SIKD DJPK (diolah). TA 2024

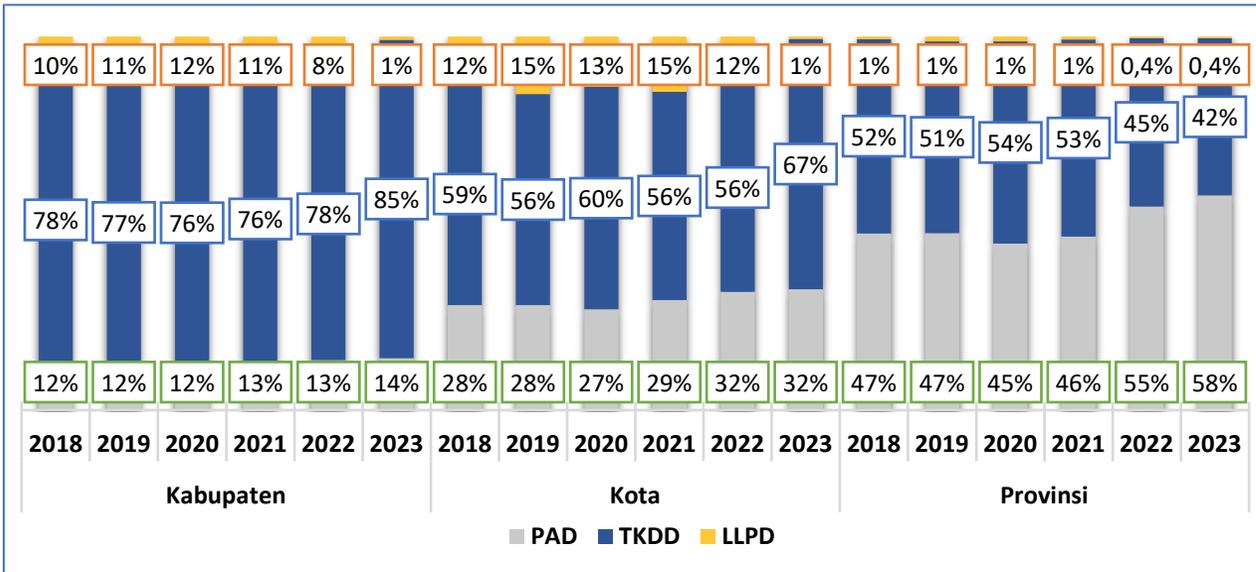
KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH MASIH DAPAT DITINGKATKAN NAMUN KEMUDAHAN BERUSAHA HARUS TERUS DIJAGA



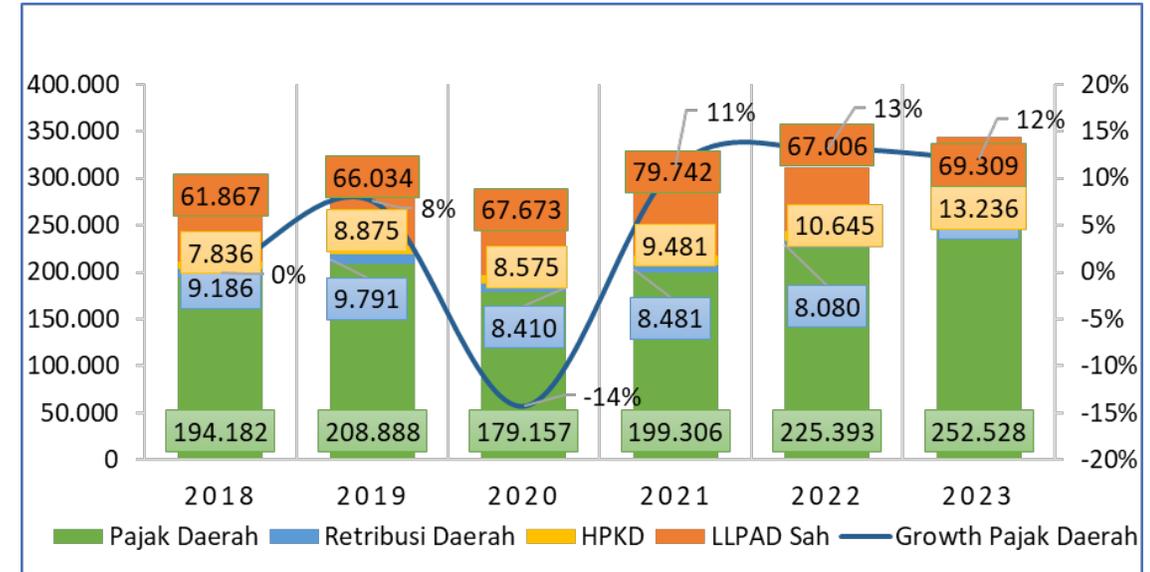
Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih perlu dioptimalkan untuk menggenjot penerimaan PAD

Kinerja Pendapatan APBD

(Miliar Rupiah)



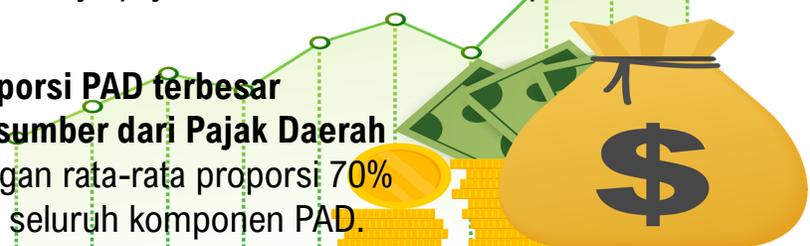
Perkembangan Penerimaan PAD



- **Proporsi PAD Kota memiliki kecenderungan semakin meningkat** setiap tahun dibandingkan Kabupaten.
- **Ketergantungan daerah terhadap TKD masih sangat besar. Tingkat ketergantungan di Kabupaten relatif lebih tinggi dibandingkan Kota.** Provinsi, memiliki proporsi TKD relatif paling rendah dibandingkan dari Kab/Kota.
- **Rata-rata Proporsi TKD** pada periode 2018-2023 secara berurutan untuk wilayah kabupaten sebesar 78%, diikuti wilayah kota dengan proporsi sebesar 59%, dan wilayah provinsi dengan rata-rata sebesar 54% .

- **Penerimaan Pajak Daerah tumbuh negatif pada masa pandemi covid-19.** pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah tumbuh negatif. Seiring dengan pemulihan ekonomi daerah, tahun 2021 penerimaan PAD khususnya pajak daerah mulai tumbuh positif.

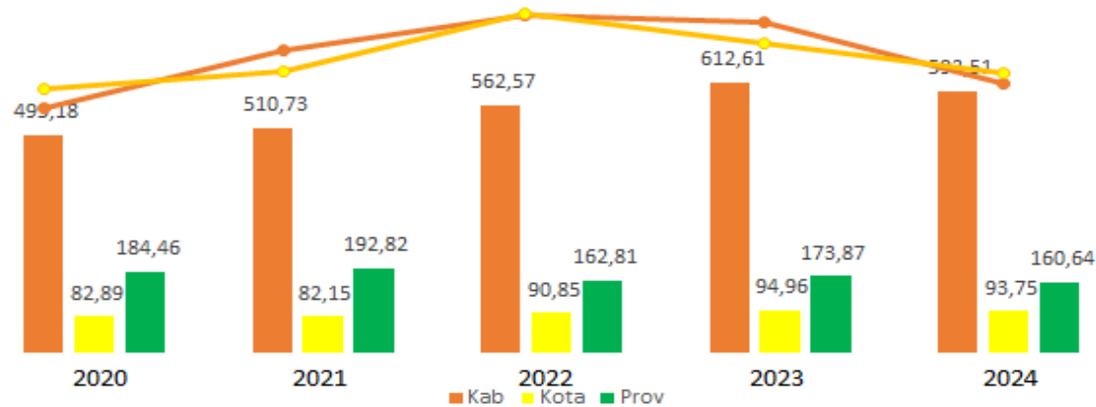
- **Proporsi PAD terbesar bersumber dari Pajak Daerah** dengan rata-rata proporsi 70% dari seluruh komponen PAD.



TATA KELOLA TKD DAN PAD PERLU TERUS DIPERKUAT SEBAGAI SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH



PERKEMBANGAN REALISASI TKD

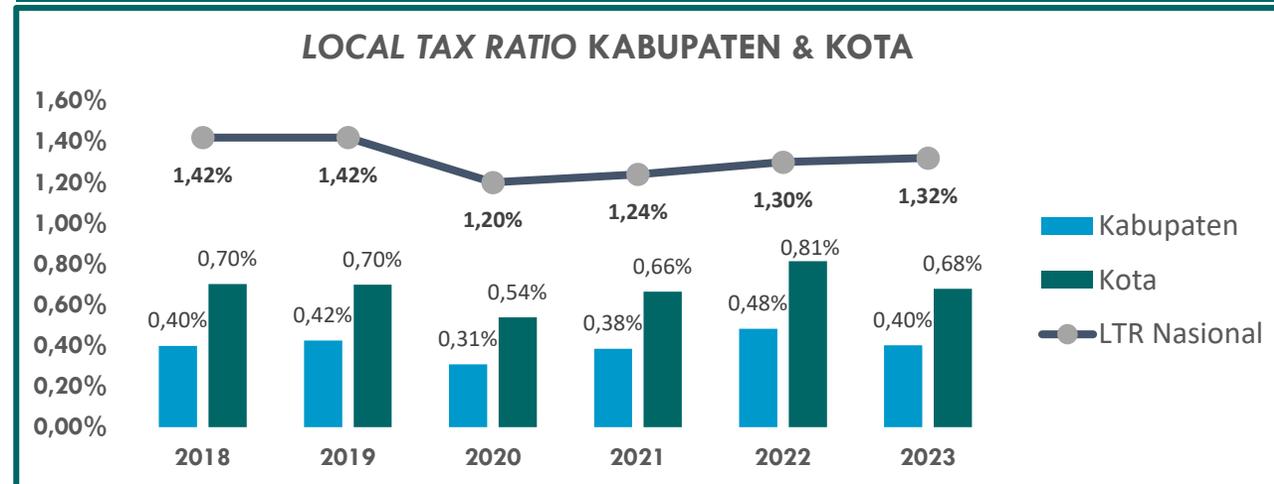


Sumber : DJPK, diolah. Realisasi TKD 2023 berdasarkan UnAudited

- Realisasi TKD untuk wilayah kota selalu meningkat setiap tahunnya.
- DAU masih menjadi komponen TKD utama pada setiap jenis pemerintahan.
- Sejalan dengan kebijakan pada UU HKPD No.1 Tahun 2022, DAU tidak akan mengalami penurunan (*hold harmless*) hingga tahun 2027.
- Dengan nilai total lebih dari 90 T pada alokasi 2024, pemanfaatan TKD perlu semakin dioptimalkan untuk akselerasi pertumbuhan maupun untuk peningkatan kualitas layanan publik.

- *Local Tax Ratio* berangsur pulih sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi
- Perkembangan local tax ratio wilayah kota sejalan dengan perkembangan nasional dan selalu berada di atas level wilayah kabupaten
- Perlu dilakukan upaya optimalisasi penerimaan PAD agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah *

PERKEMBANGAN TAX RATIO



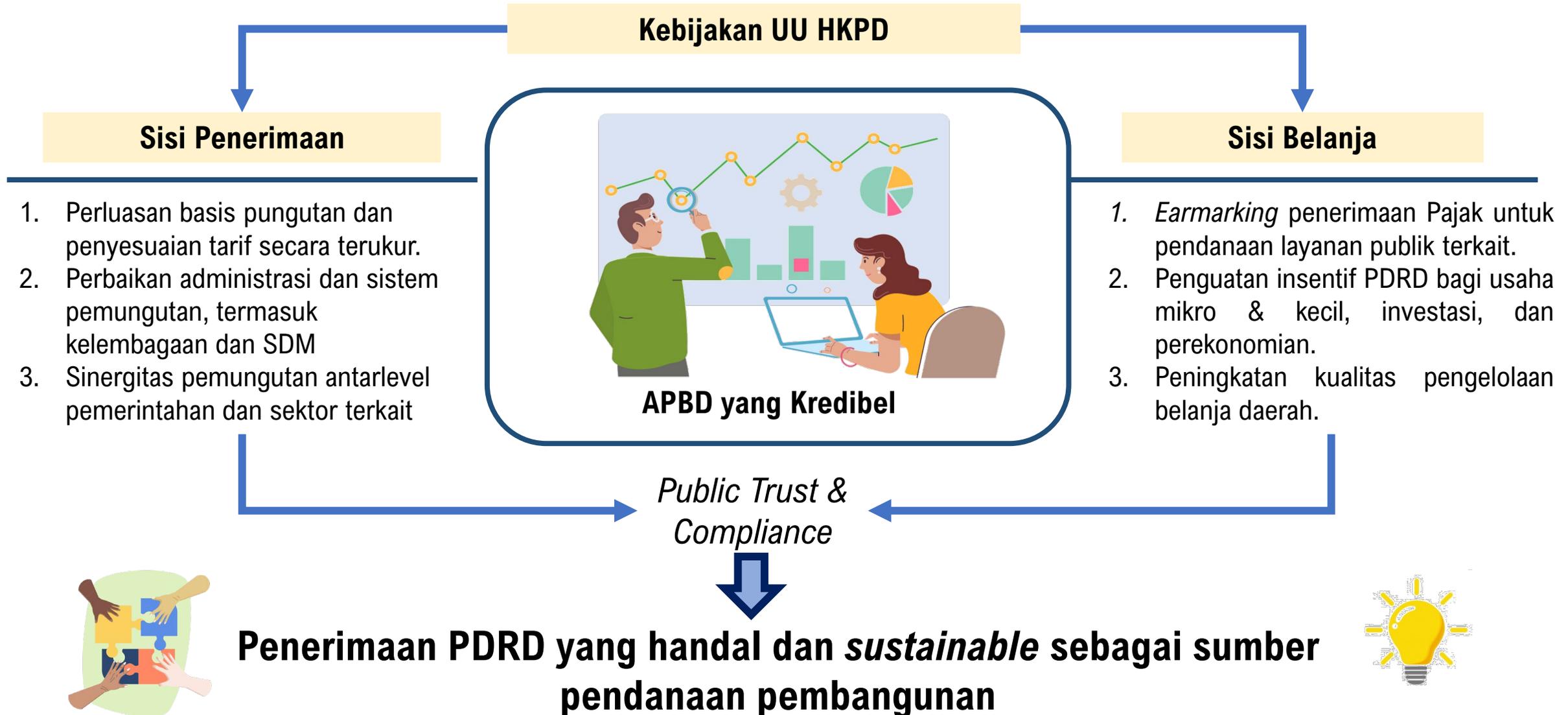
Sumber : DJPK, Realisasi APBD diolah BPS, PDRB diolah

*Realisasi APBD 2023 Unaudited

KERANGKA STRATEGI OPTIMALISASI PDRD DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL DAN MENJAGA KEMUDAHAN BERUSAHA



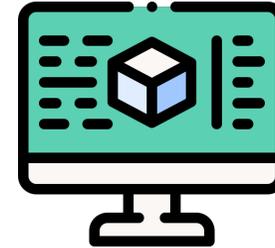
UU HKPD memberikan pendekatan integral dalam optimalisasi PDRD sebagai salah satu sumber pendanaan daerah



KEY MESSAGES AGAR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PDRD BERDASARKAN UU HKPD DAN PP KUPDRD OPTIMAL



KOMITMEN PEMDA
(Pimpinan, Organisasi dan SDM)



**PERBAIKAN KUALITAS DATA & DIGITALISASI
SISTEM PERPAJAKAN DAERAH**



**SINERGI DAN INOVASI PEMERINTAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**
penyiapan sistem administrasi dan perpajakan
dalam pemungutan Opsen (Efektif Januari 2025)



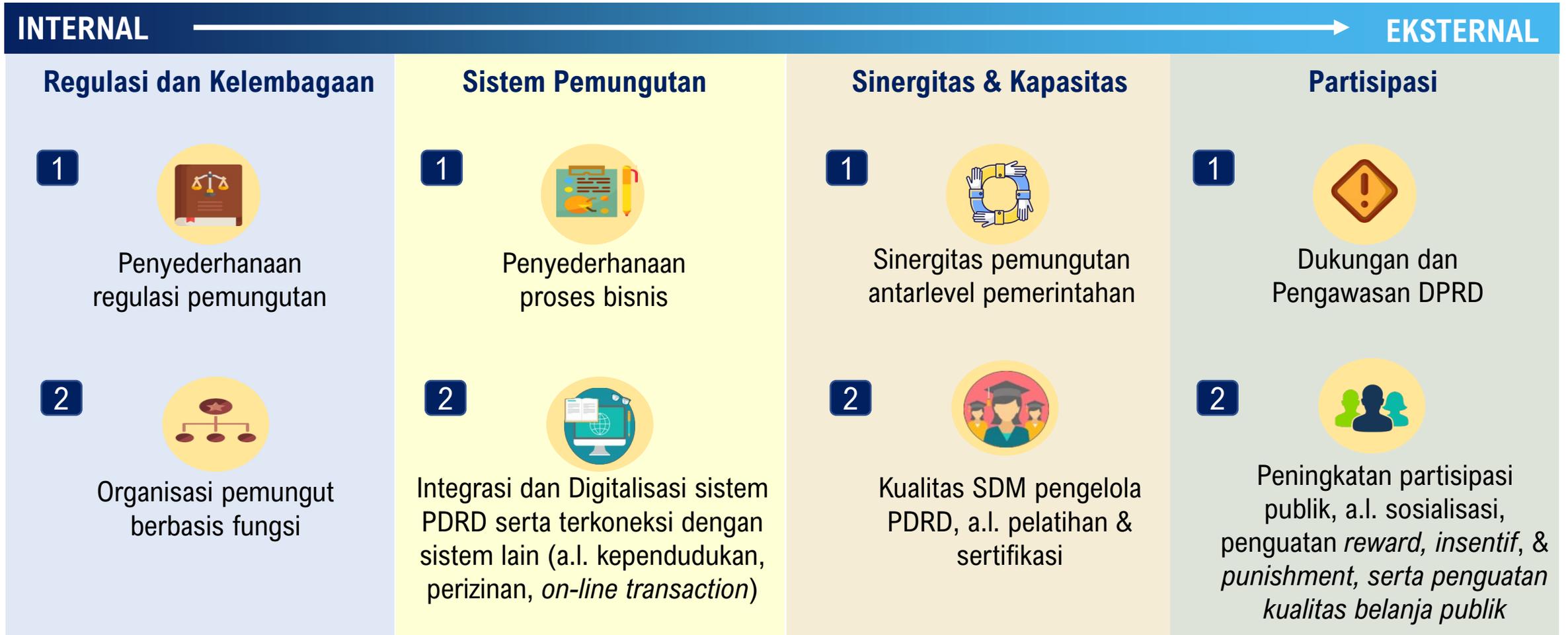
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
dalam Pelaksanaan Kebijakan PDRD kepada
Masyarakat sebagai Wajib Pajak/ Wajib
Retribusi

PERAN PEMDA DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PDRD



Dalam jangka menengah panjang, Pemda harus mulai melaksanakan optimalisasi PDRD

Upaya optimalisasi penerimaan PDRD merupakan kerja besar dan melibatkan seluruh pihak dalam rangka menjaga sumber pendanaan yang handal dan berkesinambungan bagi daerah.





**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

03

TANTANGAN DAN PELUANG WILAYAH PERKOTAAN DALAM MENDORONG KINERJA EKONOMI DAN FISKAL

VISI INDONESIA 2045: MENJADI NEGARA MAJU TERBESAR KE- 4 DI DUNIA

Hanya dapat tercapai jika Indonesia mampu memanfaatkan **prospek demografi dan ekonomi yang dimiliki**

INDONESIA HARUS OPTIMIS MENGGAPAI CITA-CITA MENJADI **NEGARA MAJU DI 2045**

DEMOGRAFI

318 Juta Penduduk

65% Usia Produktif

73% **Tinggal di Perkotaan**

70% Kelas Menengah

Sumber: BAPPENAS & BKF, Kemenkeu



EKONOMI

- **PDB terbesar ke-5** di dunia (USD 9,8T)
- Pendapatan per kapita **USD 30,300**
- Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%
- Beralih ke sektor-sektor yang lebih produktif

Prasyarat Mendukung Visi Indonesia Emas



Kesiapan Infrastruktur



Kualitas dan Daya Saing SDM



Pengelolaan SDA yang memberikan nilai tambah



Kesiapan Teknologi



Perencanaan Kewilayahan



Ekonomi & Keuangan APBN yang sehat



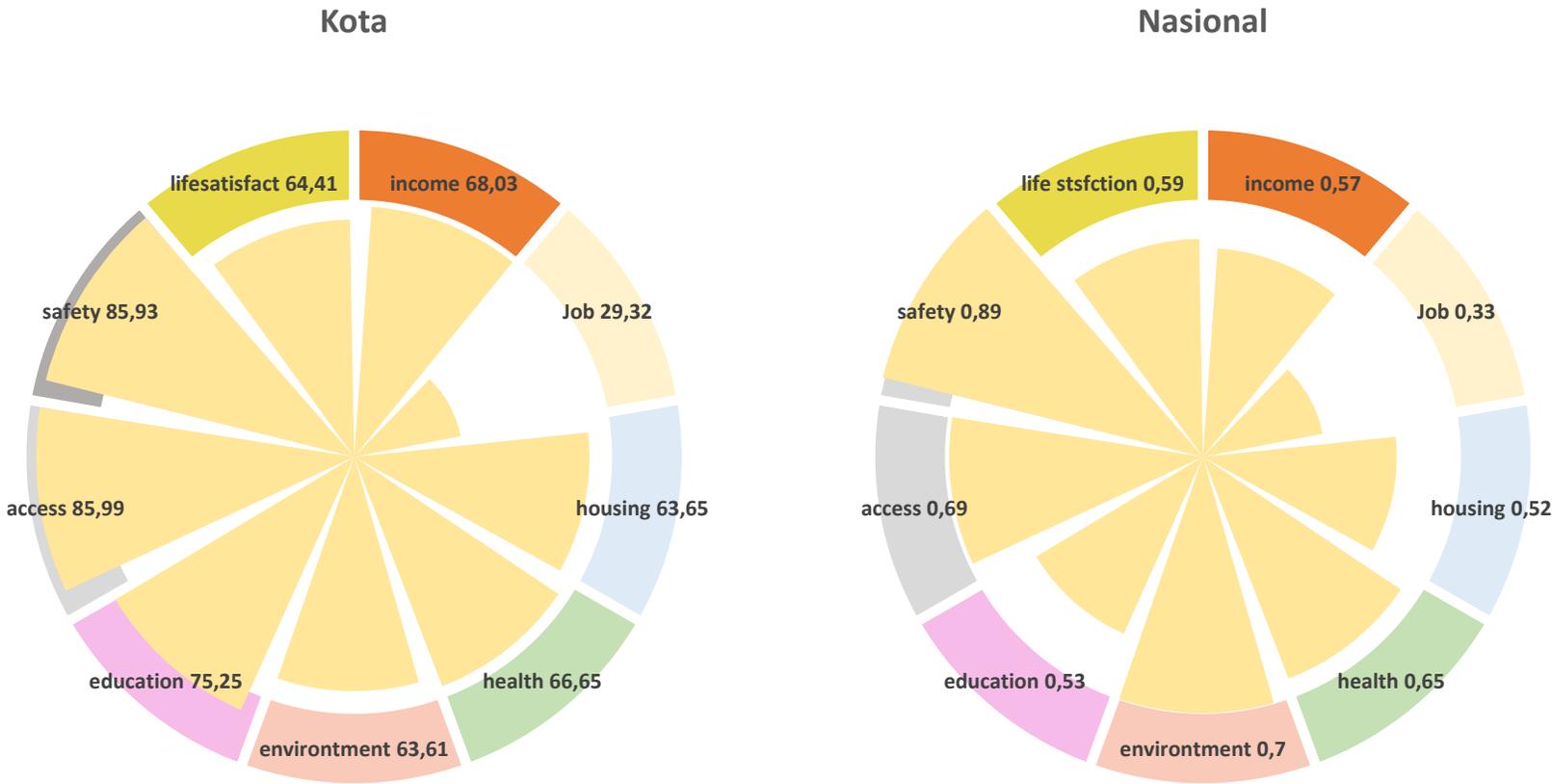
Stabilitas Makro
Stabilitas Politik
Aturan Hukum

INDEKS *WELLBEING* SEBAGAI GUIDELINE PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH PERKOTAAN



Prioritas belanja APBD dalam mendukung peningkatan kesejahteraan wilayah perkotaan dapat diarahkan pada sektor yang mengalami deprivasi indeks well-being antara lain pada sektor lingkungan, keamanan, dan pekerjaan.

Indeks Regional Well-Being wilayah Perkotaan memiliki rata-rata 69,91% sedangkan Nasional memiliki rata-rata sebesar 61,8 % .



Permasalahan Well-being di perkotaan:



Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian serius.



Kualitas udara yang buruk dan pencemaran lingkungan.



Tingkat keamanan yang rendah ditandai dengan angka kriminalitas yang cukup tinggi.

Notes: Indeks Well Being 2023 ini disusun berdasarkan *framework Regional Well-Being OECD* dengan menggunakan data Susenas 2023. Deprivasi adalah kondisi capaian indeks dibawah rata-rata nasional.

OPTIMALISASI SKEMA PEMBIAYAAN UTANG DAERAH (*CREATIVE FINANCING*) UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN



PEMBIAYAAN UTANG DAERAH (PUD)

UU HKPD



Bentuk

- Pinjaman Daerah
- Obligasi Daerah
- Sukuk Daerah

SYARAT PEMBIAYAAN UTANG DAERAH



Persyaratan Keuangan

- Batas Maksimal PUD tidak melebihi 75% Pendapatan APBD tahun sebelumnya
- Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5
- Memenuhi ketentuan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari PUD setiap tahunnya sesuai ketentuan (PMK) yang berlaku.



Persyaratan Administrasi



Persyaratan Kelayakan

Sesuai PP No.
1 Tahun 2024
(PP HKFN)

SINERGI PENDANAAN

Konsepsi sinergi pendanaan akan membuka **ruang pengembangan kerja sama antardaerah** dalam mengatasi masalah pembangunan lintas daerah yang semakin kompleks seperti area metropolitan.

Dapat dilakukan antar sumber pendanaan di APBD atau di luar APBD seperti dengan BUMN/BUMD, KPBU, dan/atau kerjasama antardaerah.

APBD

- PAD;
- TKD ; dan/atau
- Pembiayaan Utang

Non APBD

- BUMN/BUMD;
- KPBU; dan/atau
- Kerja Sama Daerah



DANA ABADI DAERAH

dana yang bersumber dari APBD yang **bersifat abadi** dan dana **hasil pengelolaannya dapat digunakan** untuk Belanja Daerah dengan **tidak mengurangi dana pokok**



Konsep Pemerintah Pusat: LPDP, yang merupakan sebuah lembaga pengelola dana abadi untuk mendanai beasiswa yang berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan.

Tujuan:

- kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi
- memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah.



CREATIVE FINANCING MELALUI SKEMA SINERGI PENDANAAN UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH



Infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Alternatif pembiayaan infrastruktur dapat lebih didorong, salah satunya melalui **Sinergi Pendanaan** dengan **skema KPBU**.



Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha **dalam penyediaan infrastruktur** untuk kepentingan umum **dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan** sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.



Analisis Finansial dan Ekonomi dalam Skema KPBU

	Analisis Finansial	Analisis Ekonomi
Tujuan	Menentukan kelayakan finansial KPBU	Memastikan manfaat sosial-ekonomi serta keberlanjutan KPBU (efektivitas, ketepatan waktu, penggunaan dana, dan sumber daya publik selama masa KPBU).
Sudut Pandang	Badan Usaha	Masyarakat/Publik/PJPK
Variabel	Pendapatan, Biaya, <i>Cost of Fund</i> , Margin, dll	Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS)
Kriteria Kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> IRR Proyek > WACC IRR Equity > Cost of Equity 	<ul style="list-style-type: none"> EIRR > Tingkat Diskonto Sosial BCR > 1



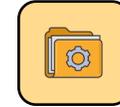
Manfaat Skema KPBU

Gabungan **keunggulan sektor publik dan sektor swasta dapat dioptimalkan**. Pemerintah dapat mendukung KPBU Daerah melalui skema **Sinergi Pendanaan**.



Dukungan Pemerintah

Pemerintah Pusat dapat menyediakan berbagai dukungan dalam pelaksanaan KPBU, di antaranya:



Project Development Facility (PDF)



Dukungan Kelayakan/*Viability Gap Fund* (VGF)



Penjaminan Infrastruktur (PT PII)

Dukungan Lainnya



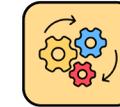
Dukungan Pelaksanaan Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan/*Availability Payment* (AP)



Pembiayaan Infrastruktur (PT SMI)



Intercept Dana Transfer Umum (DAU/DBH)*



Sinergi Pendanaan melalui TKD/Belanja K/L*

*dalam proses Pembahasan RPMK

PROYEK KPDBU SKALA KECIL ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) KABUPATEN MADIUN SEBAGAI IMPLEMENTASI *CREATIVE FINANCING*



KPDBU adalah **Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha** dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko.

Latar Belakang & Tujuan

- minimnya perawatan APJ (anggaran terbatas)
- pertumbuhan lampu swadaya akibat penduduk bertambah;
- pembayaran listrik kurang efisien (abonemen/biaya langganan);
- penggunaan lampu merkuri berdaya besar (> 125 W);
- belum efektif penggunaan meterisasi;
- distribusi APJ belum merata di seluruh wilayah.

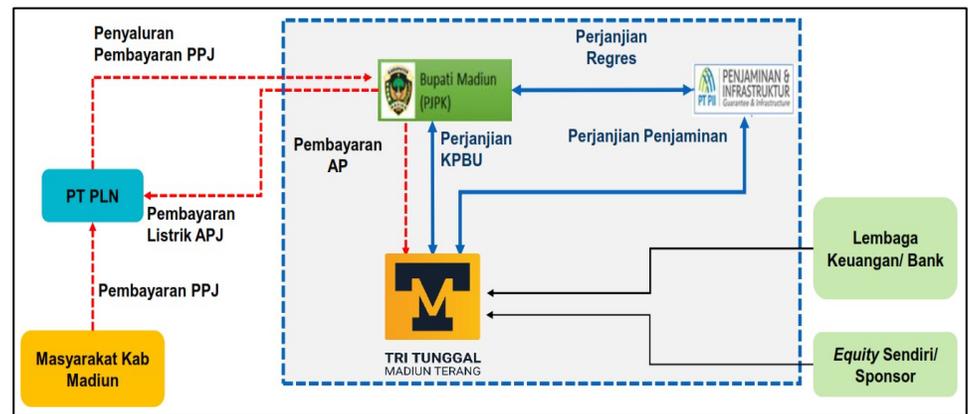
Perlu peningkatan jumlah **APJ yang hemat energi, aspek keselamatan publik, mobilitas, sektor industri dan sektor pariwisata**, hingga **aktivitas sosial ekonomi** masyarakat (khususnya pusat pemerintahan di Caruban sbg pusat perekonomian baru dan kawasan Selingkar Wilis).

Manfaat

- Penghematan biaya pembayaran tagihan listrik dan pengurangan emisi karbon dengan penggunaan lampu LED;
- Peningkatan waktu dan akses aktivitas ekonomi daerah yang berpotensi meningkatkan PAD;
- Berkurangnya tingkat kecelakaan dan tindak kriminal di jalanan.

Skema dan Rincian

PJKP	Bupati Madiun
Lingkup	Pembangunan dan pengoperasian APJ, pemasangan meterisasi, penyediaan layanan dan teknologi LED
Masa Konsesi	10 tahun operasi dan 9 bulan konstruksi
Spesifikasi Teknis	Jumlah lampu 7.459 titik, termasuk instalasi sistem meterisasi, kabel udara, dan panel box
BUP	PT Tri Tunggal Madiun Terang (Konsorsium 3 perusahaan)
Nilai Investasi	Total Capex: Rp 100 milyar Total Opex: Rp13,5 milyar
Pembayaran AP	Maksimum Rp. 20,8 milyar / tahun
Target COD	Juli 2023



- **KPDBU Skala Kecil** Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun menjadi pionier proyek APJ dengan menggunakan skema KPDBU.
- Proyek ini menggunakan skema **KPDBU *unsolicited*** (diprakarsai oleh pihak swasta)



Sumber: PT PII, 2023

WILAYAH PERKOTAAN DAPAT MEMANFAATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH



Dalam suatu studi, wilayah perkotaan disebut sebagai *the engine of global economy*, sehingga penguatan keunggulan kompetitif perkotaan dapat mendukung terciptanya nilai tambah melalui peningkatan bisnis, investasi, aktivitas ekonomi, kreativitas, talenta, dan pengunjung.

Keunggulan Kompetitif Perkotaan, diantaranya :



Memiliki **aktivitas ekonomi lebih kuat**, biasanya didominasi oleh **sektor industri, perdagangan, dan jasa** yang memiliki nilai tambah tinggi



Pada tahun 2045, mayoritas **penduduk tinggal di perkotaan (73%)**



Memiliki **potensi lapangan usaha** yang lebih luas sehingga mampu menarik **SDM terampil dan unggul**



Memiliki **akses pelayanan publik** yang lebih lengkap sehingga mampu meningkatkan **kualitas SDM**

Kebijakan Optimalisasi, diantaranya :



Mendorong investasi dengan menyediakan berbagai insentif dan penyederhanaan regulasi



Mendorong **penciptaan lapangan kerja** melalui kebijakan prakerja, peningkatan *entrepreneurship*, serta *link-and-match* tenaga kerja



Memperkuat pembangunan infrastruktur, kualitas layanan publik, dan kualitas SDM untuk meningkatkan konektivitas



Menginisiasi **kerja sama antardaerah**



Mendorong **aktivitas ekonomi berbasis komoditas berorientasi ekspor**



Mendorong aktivitas ekonomi **berbasis industri, perdagangan, dan jasa** melalui skema insentif



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**TERIMA
KASIH**

0811 150420 7

150 420

callcenter.djpk@kemenkeu.go.id

Seluruh layanan yang diberikan oleh DJPK tidak dipungut biaya

BELajar Transfer ke daerah dan Tata kelola
Ekonomi daerah bersama DJPK

**BETTER
w/ DJPK**

SERASI
SElasi bicARA soluSI

Episode 2:
Sinergi Kebijakan Fiskal
melalui KEM PPKF Regional

program peningkatan kapasitas daerah terkait TKD dan Tata Kelola Ekonomi Daerah
Pendaftaran: <https://linktr.ee/BetterWithDJPK2024>